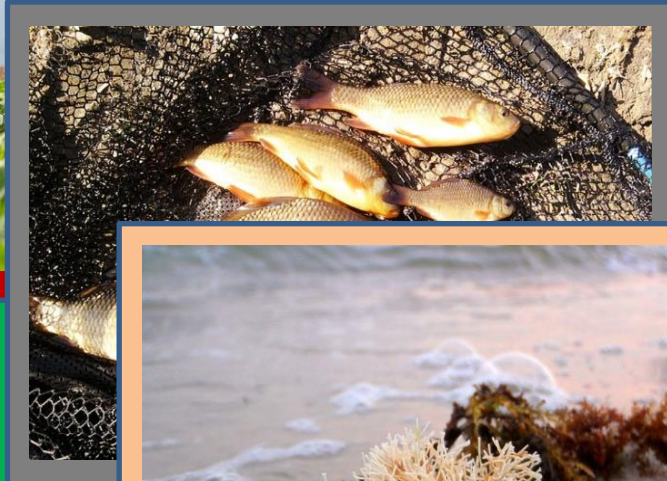




**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN 2024**



**BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA MALUKU  
TAHUN 2025**

# Kata pengantar

---

---

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Perekonomian Setda Maluku tahun 2024 merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan serta hasil yang dicapai sesuai Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan mandat yang di amanatkan dalam PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ((LKIP) ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2024 Biro Perekonomian Setda Maluku yang telah diperjanjikan.

Penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Perekonomian Setda Maluku tahun 2024 ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, untuk itu kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Ambon, 17 Januari 2025

Kepala Biro Perekonomian  
Setda Maluku



Onesmus Soumeru, S.Sos, S.Pd. M. Si  
NIP. 19660919 198601 1001

**Daftar Isi**

<i>kata pengantar</i> .....	1
Daftar Isi .....	2
Daftar Tabel .....	3
.....	
Daftar Gambar .....	V
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	5
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	6
1.3. STRUKTUR ORGANISASI .....	7
1.4. SUMBER DAYA .....	8
a. Sumber daya Manusia.....	9
b. Aset .....	9
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN .....	12
1.6. ISU STRATEGIS .....	12
<b>BAB. II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>14</b>
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	14
a. Visi.....	15
b. Misi .....	15
c. Tujuan.....	16
d. Indikator Kinerja Utama .....	16
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	17
<b>BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>22</b>
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	22
3.2. REALISASI ANGGARAN .....	45
<b>BAB. IV. PENUTUP</b> .....	<b>51</b>

4.1. TINJAUAN UMUM .....	51
4.2. TINJAUAN KHUSUS .....	51
4.2. SARAN DAN TINDAK LANJUT .....	52

Lampiran-lampiran

## Daftar Tabel

	Hal
Tabel. 1. Data Pegawai berdasarkan Gol. Ruang .....	9
Tabel. 2. Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	10
Tabel. 3. Data Nilai Aset Biro Perekonomian Setda Maluku Tahun 2024.....	10
Tabel. 4. Tujuan Strategik Biro Perekonomian Setda Maluku 2019-2024 .....	16
Tabel. 5. Sasaran Strategis (SS1) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dari Tujuan Strategis (T1) .....	18
Tabel. 6. Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Setda Maluku Tahun 2024 .....	20
Tabel. 7. Kategori Sesuai Skala Ordinal.....	22
Tabel. 8. Capaian Indikator Berdasarkan Kategori Skala Ordinal .....	23
Tabel. 9. Pengukuran Capaian Kinerja Setda Maluku Tahun 2024.....	26
Tabel. 10. Capaian sasaran terwujudnya Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.....	27
Tabel. 11. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran 1 antara tahun 2023 dengan tahun 2024.....	27
Tabel. 12. Perbandingan realisasi Indikator sasaran 1 tahun 2023 dan 2024 serta tahun akhir periode Renstra.....	28
Tabel. 13. Capaian sasaran Meningkatnya Infrastruktur dan usaha-usaha daerah.....	32
Tabel. 14. Perbandingan realisasi Kinerja dan capaian Kinerja sasaran 2 antara tahun 2023 dengan tahun 2024.....	32
Tabel. 15. Perbandingan realisasi Indikator sasaran 2 tahun 2023 dan 2024 serta tahun akhir periode Renstra.....	33
Tabel. 16. Alokasi Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Biro Perekonomian Setda Maluku dalam kurun waktu .....	46
Tabel. 17. Realisasi Belanja Langsung Per Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Provinsi Maluku Tahun 2024.....	47

### Daftar Gambar

Gambar. 1.	Struktur Organisasi Biro Perkonomian Setda Maluku.....	26
Gambar. 2.	Nilai Aset Biro Perkonomian Setda Maluku .....	11
Gambar. 3	Grafik Capaian Indikator Kinerja berdasarkan skala Ordinal tahun 2024.....	23
Gambar. 4.	Presentase sarapan anggaran Belanja Langsung Biro Perkonomian Daerah Setda Maluku T.A. 2023 s/d 2024.....	46

## 1.1. LATAR BELAKANG

Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti lagi dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, dan diganti lagi dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik. Kewenangan daerah otonomi menjadi sangat besar, karena hampir semua urusan Pemerintah diserahkan kepada daerah termasuk pembangunan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena pemerintah daerahlah yang harus menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Maju mundurnya perekonomian suatu daerah tergantung dari kemauan, perencanaan, pelaksanaan, inovasi, kreativitas pemerintah daerah bersama masyarakat serta strategi pembangunan dan pengembangan ekonomi yang tepat, akan membantu pelaksanaan perekonomian daerah semakin berkembang.

Untuk itu, Biro Perekonomian merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Maluku yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 25 tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku harus merespon tantangan pembangunan ekonomi baru di Maluku melalui komitmen, perencanaan, pelaksanaan, dan inovasi dalam strategi pembangunan ekonomi daerah. Dalam kedudukannya sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

LKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 sejatinya adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Maluku pada tahun mendatang. Pelaporan Kinerja ini juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

## **1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas dan Fungsi serta susunan organisasi Biro Perekonomian Setda Maluku di atur dalam Peraturan Gubernur Maluku nomor 25 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku. Maka tugas pokok Biro Perekonomian Setda Maluku adalah sebagai berikut :

### **a. Tugas Pokok**

Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Assiten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan investasi dan produk unggulan daerah melalui bidang penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

**b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Perekonomian Setda Maluku menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program peningkatan investasi dan produk unggulan daerah sesuai Rencana Strategis Pemerintah Daerah / RPJMD;
2. Pengkoordinasian penyusunan bahan penyusunan kebijakan peningkatan investasi dan produk unggulan daerah;
3. Pembinaan dan fasilitasi peningkatan investasi dan produk unggulan daerah;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi BUMD;
5. Pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya;
6. Pelaksanaan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya

**1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku nomor 36 tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan pengawas di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku sebagai berikut :

- 1) Kepala Biro
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Koordinator Jabatan Fungsional
  - a. Substansi Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
  - b. Substansi Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup
  - c. Substansi Sumber Daya Alam Energi dan Air
- 4.) Koordinator Jabatan Fungsional
  - a. Substansi BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
  - b. Substansi BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
  - c. Substansi Badan Layanan Umum Daerah

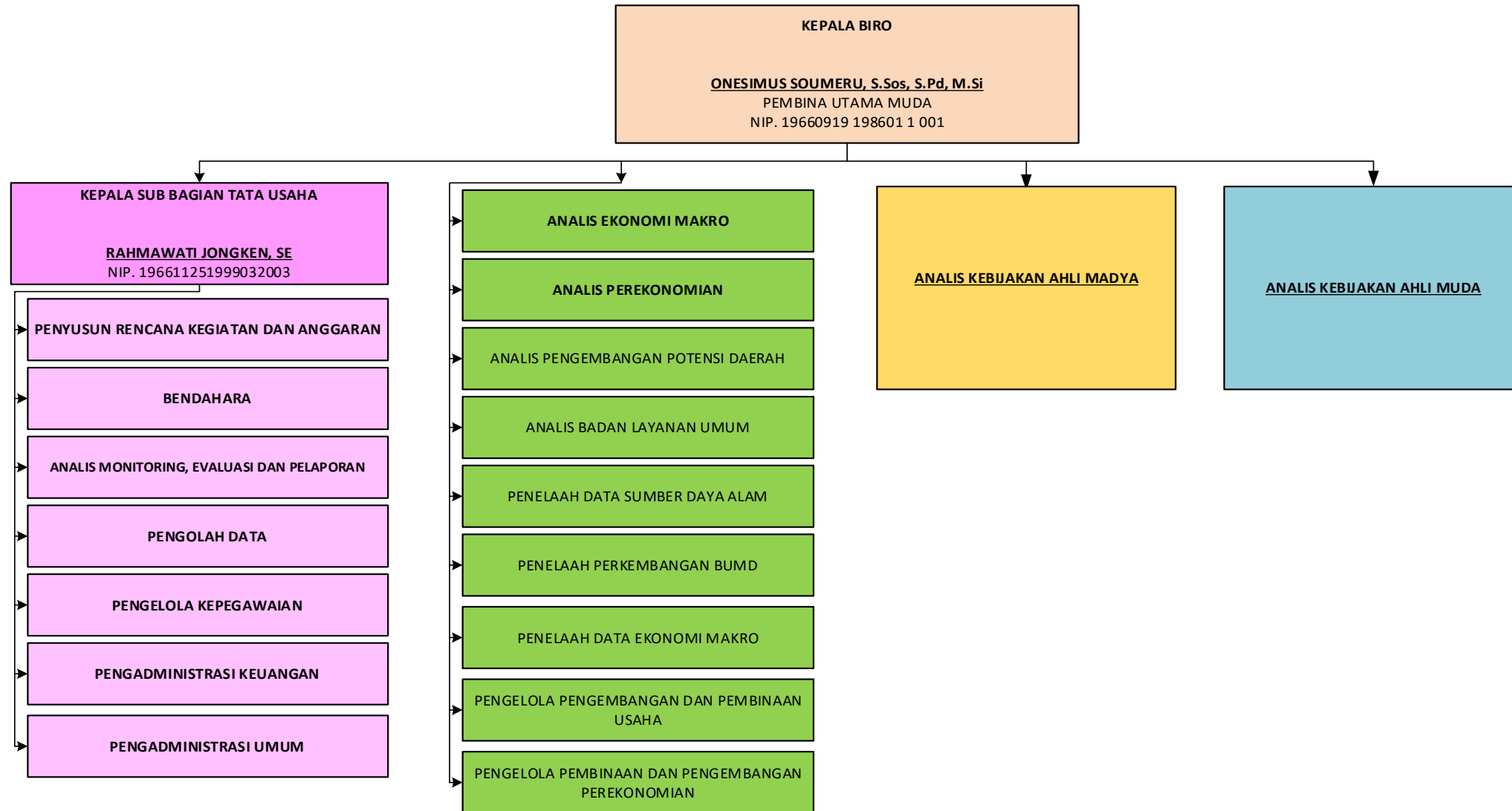
5. Koordinator Jabatan Fungsional

- a. Substansi Analisis ekonomi Makro
- b. Substansi Analisis ekonomi Mikro

Bagan Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Maluku sebagaimana pada Bagan berikut :

**Gambar.1.**  
**Struktur Organisasi Biro Perekonomian**  
**Setda Maluku Tahun 2024**

### Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Maluku Tahun 2024



**1.4. SUMBER DAYA**

**a. Sumber daya Manusia**

Berdasarkan Bezetting Pegawai Keadaan 31 Desember 2024, jumlah Pegawai pada Biro Pereonomian Setda Maluku sebanyak 22 orang yang terdiri dari :

**1. Golongan**

**Tabel. 1.**

**Data Pegawai berdasarkan Gol. Ruang**

Jumlah Pegawai	Pangkat Golongan Ruang																
	IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a
22		-	1	-	2	15	4	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-
	3					16				3			-				

**2. Tingkat Pendidikan**

**Tabel. 2.**

**Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan									
	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	S D
22	-	6	13	-		-	-	3	-	-

**b. Aset**

Guna Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka Biro Perekonomian Setda Maluku ditunjang dengan sarana prasarana/aset baik yang bersifat tetap maupun asset lainnya yang sampai dengan perbandingan antara asset tahun 2023 dengan tahun 2024 sebagai berikut :

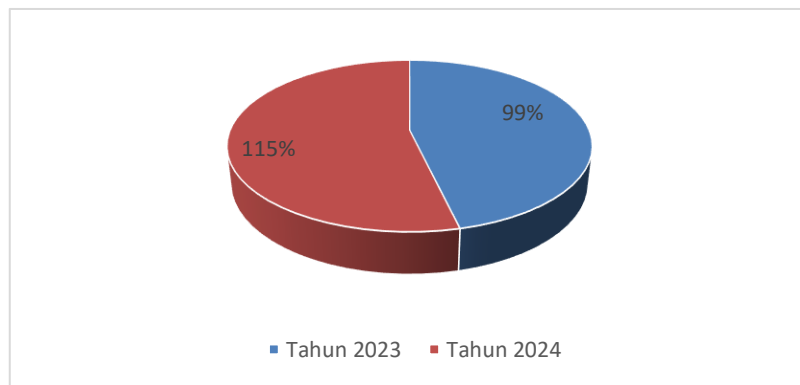
**Tabel. 3.**  
**Data Nilai Asset Biro Perekonomian Setda Maluku**  
**Tahun 2023 – 2024**

NO.	NAMA BARANG	NILAI ASET	
		TA.2023	TA. 2024
1	2	3	4
	<b>ASET TETAP</b>	<b>585.508.975,00</b>	<b>585.555.475,00</b>
<b>01</b>	<b>TANAH</b>	-	-
1	Tanah Untuk bangunan Gedung	-	-
<b>02</b>	<b>PERELATAN DAN MESIN</b>	<b>486.117.975,00</b>	<b>585.508.975,00</b>
2	Alat-alat besar	-	-
3	Alat-alat angkutan	19.847.280,00	19.847.280,00
4		-	-
5	Alat Bengkel dan alat ukur	-	-
	Alat Pertanian		
6	Alat kantor dan Rumah Tangga	481.021.695,00	560.661.695,00
7		5.000.000,00	5.000.000,00
8	Alat studio dan alat komunikasi	-	-
9	Alat-alat Kedokteran		
10	Alat-alat Laboratorium		
	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan		
<b>03</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		
11	Bangunan Gedung	-	-
12	Monumen	-	-
<b>04</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>		
13	Jalan dan Jembatan		
14	Bangunan Air/Irigasi		
15	Instalasi		
16	Jaringan		
<b>05</b>	<b>ASET TETAP LAINYA</b>		
17	Buku dan perpustakaan		
18	Barang bercorak kebudayaan		
19	Hewan dan ternak serta tanaman		
20	Aset Renovasi		
<b>06</b>	<b>KONTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	-	-
21	Kontruksi dalam pengerjaan		
	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>3.937.500,00</b>	<b>3.937.500,00</b>
<b>07</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>3.937.500,00</b>	<b>3.937.500,00</b>
21	Aset lainnya	-	-
22	Aset kondisi rusak berat/Hilang/Lainya	-	3.937.500,00
23	Aset yang dimanfaatkannya pihak lain	-	
24	Aset tidak berwujud	-	

Jika melihat pada table.3. Asset di tahun 2023 ke tahun 2024 dengan nilai akumulasi adalah sebesar Rp.46.500.00,- (20%). Ada penambahan aset sehingga persentase perbandingan perolehan asset sebesar sama dapat dilihat pada gambar 2. Berikut ini :

**Gambar.2.**

**Nilai Biro Perekonomian Setda Maluku  
Tahun 2023 dan Tahun 2024  
Nilai Aset Biro Perekonomian  
Setda Maluku**



### **1.5 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LKIP adalah sebagai penjabaran Visi dan Misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk pertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan Misi instansi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sasaran yang telah ditetapkan, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pihak yang membutuhkan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkata kinerja.

### **1.6 ISU-ISU STRATEGIS**

Dengan mengacu pada pencapaian kinerja yang diperoleh, maka Biro Perekonomian Setda Maluku melakukan evaluasi terhadap beberapa isu strategis yang ditemui dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1. Isu strategis belum maksimalnya akses UMKM terhadap layanan Perbankan dan pasar lebih disebabkan oleh fasilitas UMKM yang belum merata dalam hal penyiapan akses perbankan dan pasar
2. Isu strategis Pemantauan dan Pengendalian Inflasi belum terlaksana secara optimal, untuk itu pengendalian inflasi menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi daerah karena terkait kenaikan harga barang secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
3. Isu strategis belum optimalnya penataan kelembagaan BUMD :  
Isu strategis ini lebih difokuskan pada penataan tata kelola kelembagaan BUMD agar dapat menjadi usaha yang sehat dan profitable bagi daerah.
4. Isu strategis kerja sama dan promosi potensi keunggulan daerah belum terlaksana secara maksimal. Isu ini menjadi sangat penting mengingat kerja sama adalah langkah kolobaratif dalam rangka mempromosikan potensi daerah guna menunjang perekonomian daerah kedepan.

# Perencanaan Kinerja



## 2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (Lima) tahun, dan menjadi landasan penyelenggaraan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis suatu instansi.

Dokumen Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) Tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun secara sistimatis berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan strategis yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran.

Biro Perekonomian Setda Maluku secara organisatoris merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku. Oleh karna itu Rencana Stratgis yang disusun pada intinya merupakan satu kesatuan dan merupakan tindaklanjut dari Rencana Stratgis Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

**a. Visi**

Berkaitan dengan isu Strategis dan kondisi pelayanan organisasi, maka rumusan mengenai visi di dasarkan pada visi Pemerintah Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024 sebagai berikut :

Visi
<b><i>“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”</i></b>

**b. Misi**

Untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi Maluku tersebut maka ditetapkan misi Pemerintah Provinsi Maluku sebagai berikut :

Kode	Misi
M1	Mewujudkan Birkraasi Yang Dinamis, Jujur, Bersih Dan Melayani
M2	Meningkatkan Kualitas Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau
M3	Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan
M4	Peningkatan Infrastruktur Dan Konektifitas Gugus Pulau
M5	Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Infestasi, Budaya Dan Pariwisata
M6	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Kreatif, Mandiri Dan Berprestasi

### c. Tujuan

Bertolak dari visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 4.**  
**Tujuan Strategik Biro Perekonomian Setda Maluku**  
**Tahun 2019 – 2024**

Kode	Tujuan Strategis
T1	Mewujudkan Perekonomian Daerah Maluku yang kuat berbasis gugus kepulauan

### d. Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Renstra

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah alat ukur yang digunakan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan, sehingga terlihat indikasi tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kegiatan yang di tetapkan, atau melaluinya dapat diperoleh Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik sehingga dapat dibandingkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang nantinya dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perekonomian Setda Maluku sesuai Rencana Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.**  
**Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Setda Maluku**  
**Tahun 2024**

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023		2024	Permasalahan 2024
			Real	Real	Real	Real	Target	Real	Real	
1.	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	5,57		5,33	5,73	5,60-6,27	5,69%	6,06%-6,86%	Ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan pemerintah, serta kinerja investasi yang meningkat
2.	<b>Inflasi</b>	%	2,87	0,21	4,01	6,28	2,10-3,24	2,81%	1,28%	Pengendalian inflasi tahun 2024 di Provinsi Maluku dibawah target Roadmap 2,5±1%. Inflasi yang rendah menandakan daya beli masyarakat yang menurun.
3.	<b>Jumlah UMKM yang terbina dan terhubung dengan Bank</b>		-	-	-	860	1600	-	195	Kurangnya anggaran berdampak langsung pada jumlah Petugas KKMB di Kabupaten/Kota, sehingga target tahun 2024 tidak terpenuhi.

4.	<b>Persentase Usaha Daerah / BUND yang sehat dan Profitable</b>					31%	40%	-	39%	BUMD perlu memaksimalkan pengelolaan kinerjanya agar target yang telah ditetapkan dapat terealisasi
----	---	--	--	--	--	-----	-----	---	-----	---

## **2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang menghasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang menghasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Sebagai langkah penjabaran Renstra ke dalam target - target tahunan dan sebagai wahana yang menghubungkan dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam tahun tertentu maka Biro Perekonomian Setda Maluku telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan wujud nyata untuk meningkatkan komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagaimana tertuang dalam tabel 6 berikut ini :

**Tabel. 6****Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Setda Maluku Tahun 2024**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro Perekonomian	Persentase waktu layanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan administrasi Umum Lingkup Biro Perekonomian dengan baik	100%
2.	Meningkatnya kualitas pengordinasian Perumusan kebijakan Daerah di Bidang Kebijakan Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Makro yang di hasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Makro yang di Monitoring dan dievaluasi	95%
		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Mikro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Kebijakan Daerah dibidang Analisis ekonomi Mikro yang dimonitoring dan dievaluasi	95%
3.	Meningkatnya kualitas Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber daya alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	95%
		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber daya alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang dimonitoring dan dievaluasi	95%

		Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dimonitoring dan dievaluasi	95%
		Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dihasilkan melalui Pengordinasian yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dimonitoring dan dievaluasi	95%
4.	Meningkatnya kualitas Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah di Bidang Badan Usaha Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Badan Umum Layanan Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti	95%
		Persentase BUMD Bidang Jasa Keunagan dan Aneka Usaha yang dibina dengan baik	100%
		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah dibidang BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti	95%
		Persentase BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dibina dengan baik	50%
		Persentase BUMD Bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dimonitoring dan dievaluasi	100%
		Persentase Rumusan Kebijakan Teknis Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Badan Layanan Umum Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	95%



### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka Biro Perkonomian Seta Maluku melakukan atribusi penilaian dengan **Skala Ordinal**. Skala Ordinal merupakan skala yang membedakan antara kategori tingkat atau urutan terhadap capaian kinerja Biro Perkonomian Setda Maluku selama Tahun 2024. Skala Ordinal dalam Laporan Akuntabilitas ini sebagai berikut :

**Tabel. 7**

#### **KATEGORI SESUAI SKALA ORDINAL**

<b>NO</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	<b>KATEGORI</b>
1	85 Sampai dengan 100	Berhasil
2	70 s/d kurang dari 85	Cukup Berhasil
3	55 s/d kurang dari 70	Kurang Berhasil
4	kurang dari 55	Tidak Berhasil

Penggunaan skala ordinal ini untuk menilai tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja serta faktor-faktor penghambat sehingga dapat memacu peningkatan dan perbaikan kinerja organisasi ke depan.

Untuk mengukur pencapaian kinerja tahun 2024, Biro Perkonomian Setda Maluku Provinsi Maluku menggunakan 3 indikator Kinerja, dengan tabel berikut : capaian indikator berdasarkan katagori skala ordinal sebagai berikut:

**Tabel. 8**

**CAPAIAN INDIKATOR BERDASARKAN KATEGORI SKALA ORDINAL**

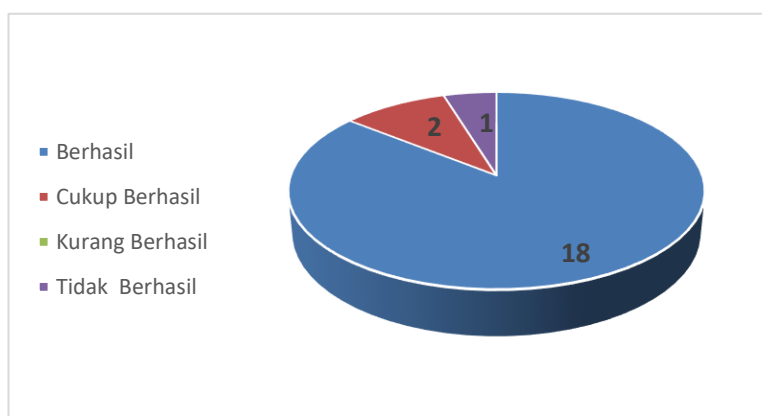
KATAGORI	INDIKATOR
Berhasil	18
Cukup berhasil	2
Kurang berhasil	-
Tidak berhasil	1

Berdasarkan tabel 8 diatas, maka capaian kinerja Biro Perekonomian Setda Maluku tahun 2024 relatif berhasil. untuk melihat persentase capaian kinerja per kategori maka dapat tergambarkan pada grafik berikut ini :

**Gambar. 1.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

**Capaian Indikator Kinerja**

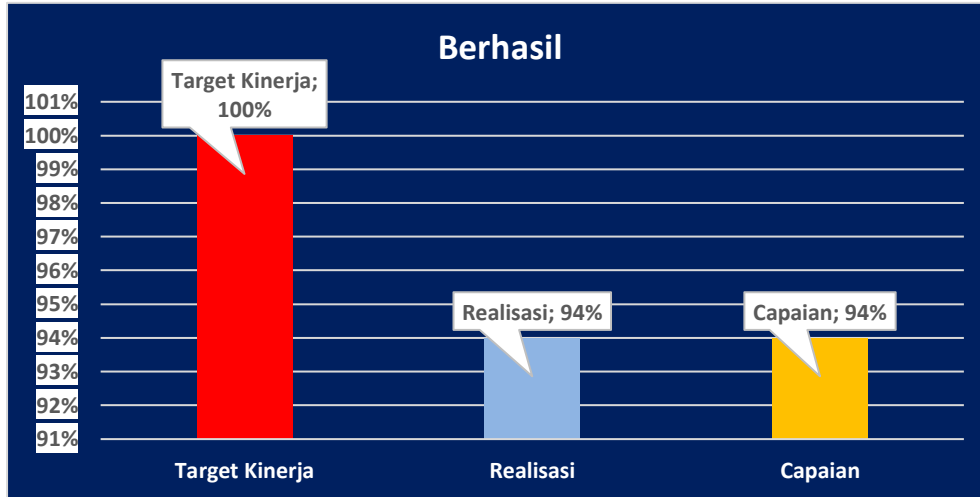


Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian Kinerja Biro Perekonomian Setda Maluku dengan capaian 85% dinyatakan berhasil dan 11% dinyatakan cukup berhasil, 0,5% dinyatakan tidak berhasil

**Gambar.1.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan administrasi Umum

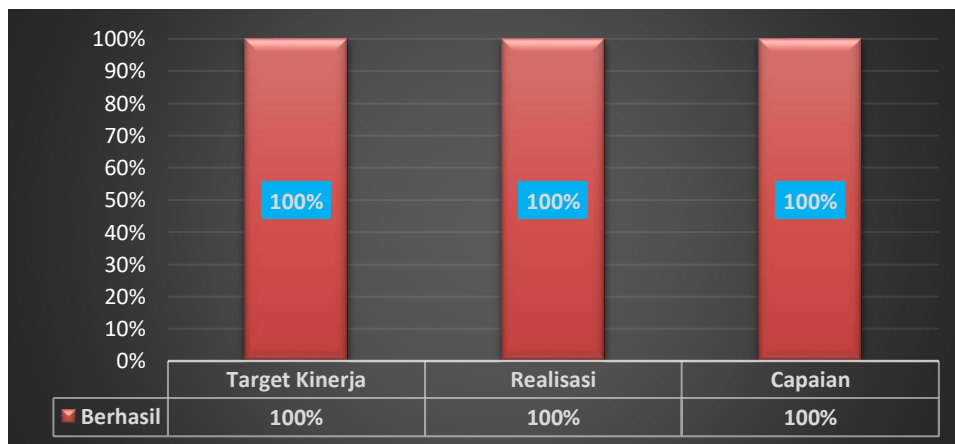


Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian kinerja Indikator Kinerja *Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan administrasi Umum* dengan capaian 94% dinyatakan berhasil.

**Gambar. 2.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan Daerah dibidang Analisis Ekonomi Makro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti



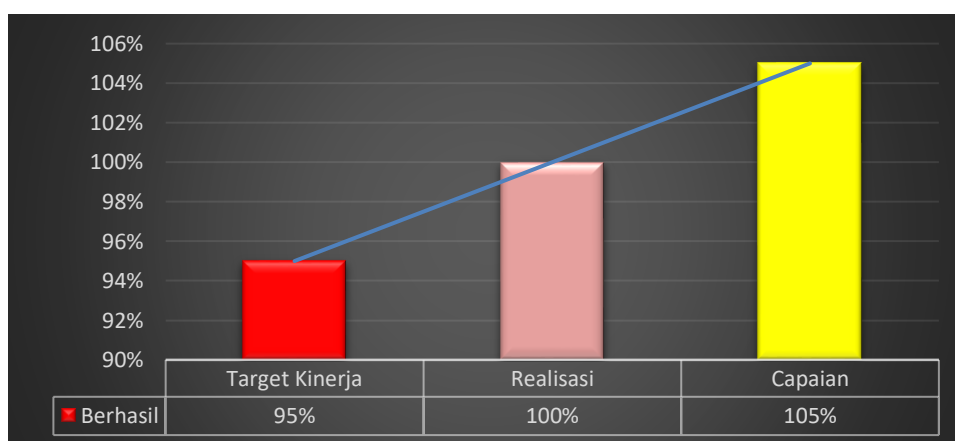
Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian kinerja Indikator Kinerja Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kebijakan Ekonomi Makro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti dengan capaian 100% dinyatakan berhasil.

**Gambar.3.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

**BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Makro yang dimonitoring dan dievaluasi



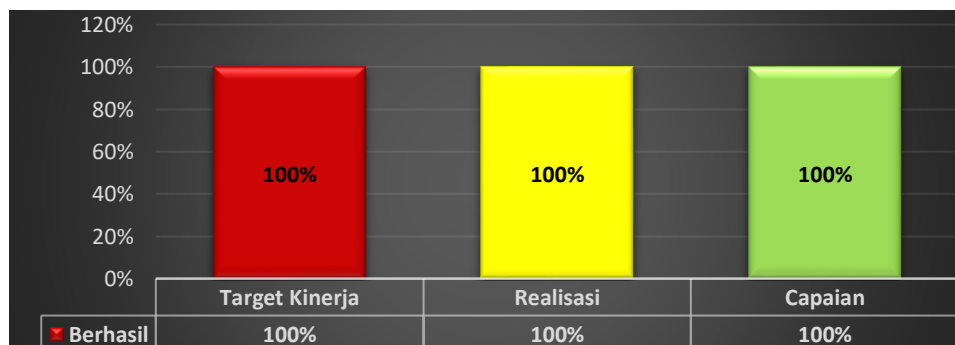
Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian kinerja Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Makro yang dimonitoring dan dievaluasi 105% dinyatakan berhasil.

**Gambar.4.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

**BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Mikro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti



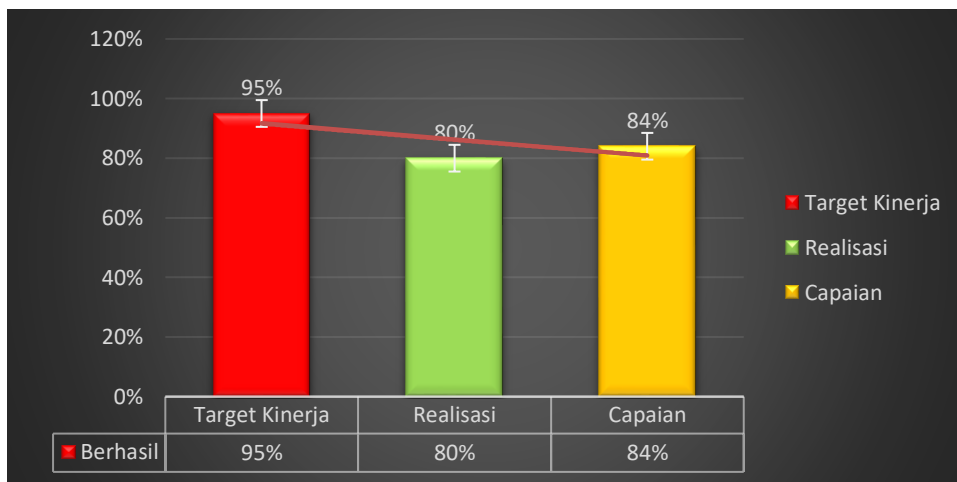
Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian kinerja Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Mikro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti 100% dinyatakan berhasil.

**Gambar.5.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

**BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Mikro yang dimonitoring dan dievaluasi



Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian kinerja Indikator Persentase Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Mikro yang dimonitoring dan dievaluasi capaian 85% dinyatakan berhasil.

**Gambar.6.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

**BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelauatan dan Perikanan yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti



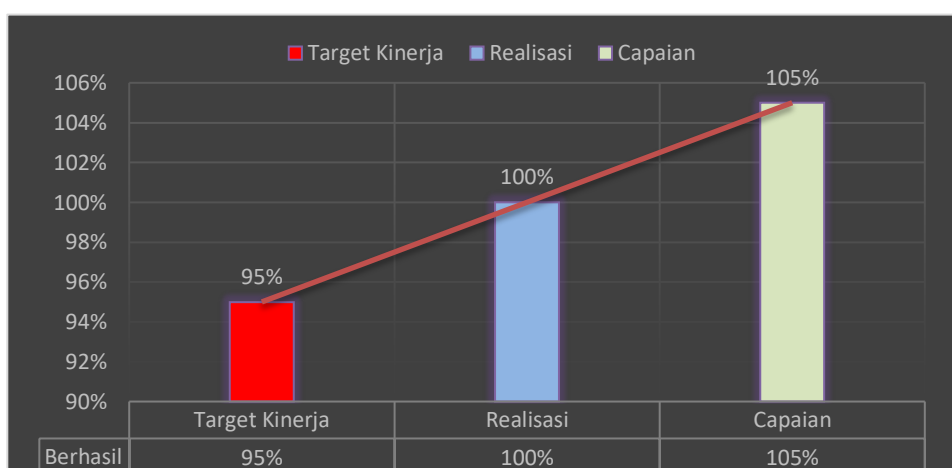
Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti dengan capaian 100% dinyatakan berhasil.

**Gambar.7.**

### **GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

#### **BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang dimonitoring dan dievaluasi

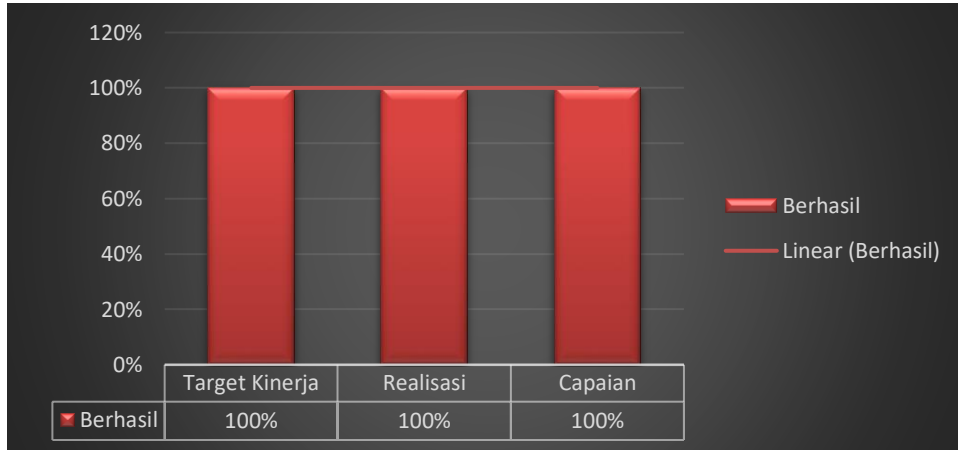


Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang dimonitoring dan dievaluasi dengan capaian 105% dinyatakan berhasil

**Gambar.8.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti

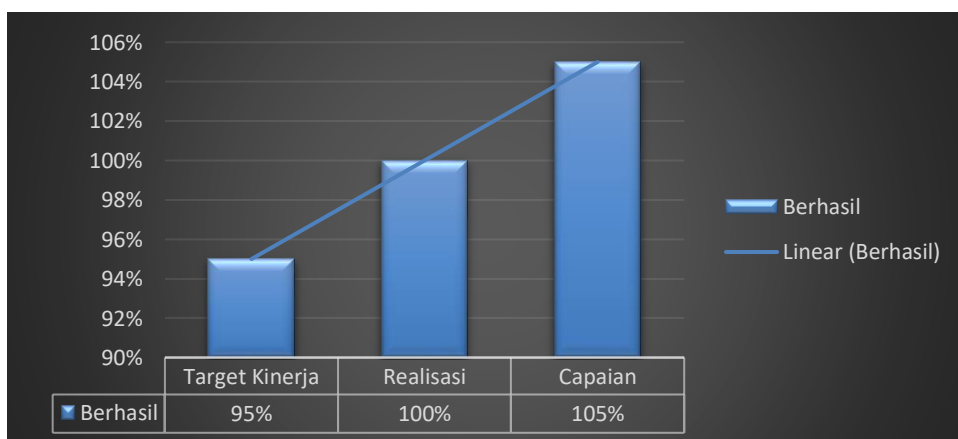


Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti dengan capaian 100% dinyatakan berhasil

**Gambar.9.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dimonitoring dan dievaluasi

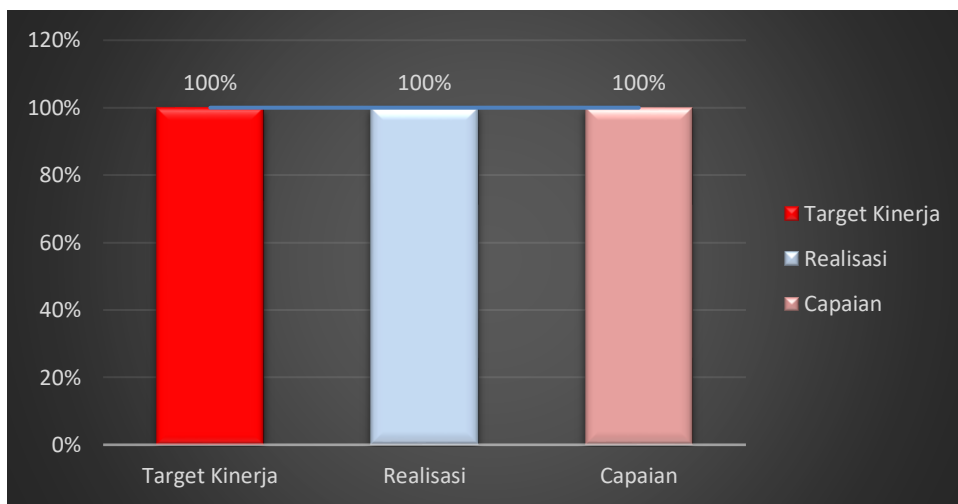


Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dimonitoring dan dievaluasi dengan capaian 105% dinyatakan berhasil

**Gambar.10.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti



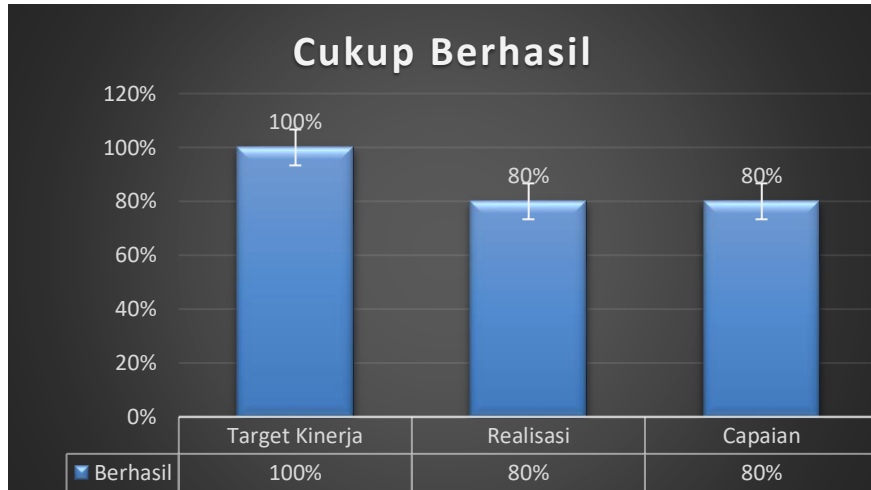
**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti dengan capaian 100% dinyatakan berhasil.

**Gambar.11.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dimonitoring dan dievaluasi

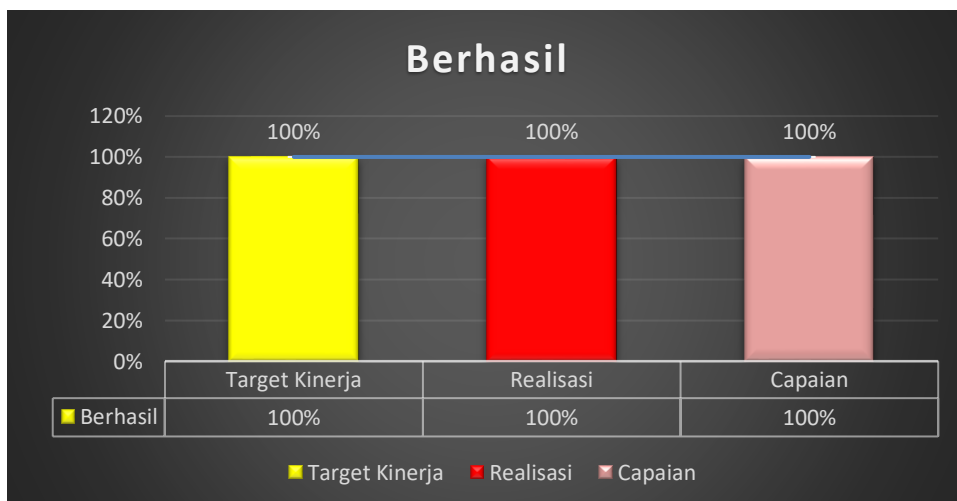


Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dimonitoring dan dievaluasi dengan capaian 80% dinyatakan cukup berhasil.

**Gambar.12.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti

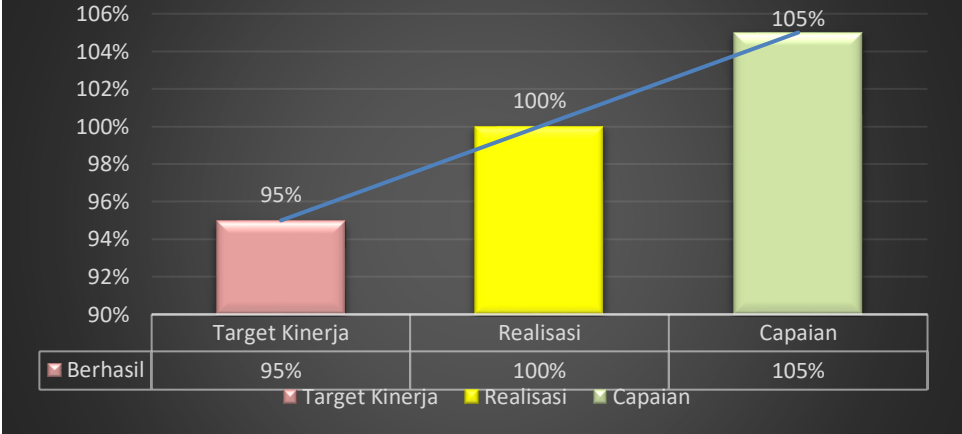


Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti dengan capaian 100% dinyatakan berhasil.

**Gambar.13.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti

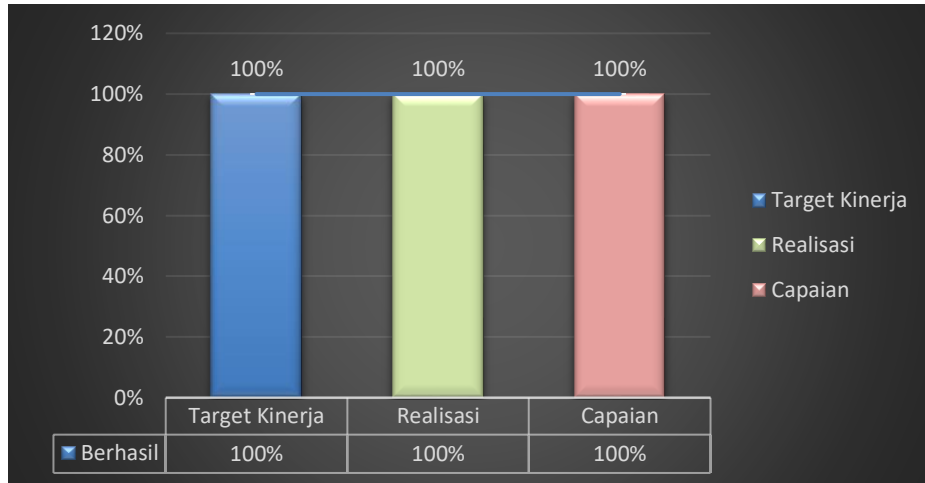


Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase Rumusan Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti dengan capaian 105% dinyatakan berhasil.

**Gambar.14.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Persentase BUMD  
bidang Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang dibina dengan baik



Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 capaian kinerja Indikator Persentase BUMD bidang Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang dibina dengan baik dengan capaian 100% dinyatakan berhasil.

**Gambar.15.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Persentase BUMD Bidang Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang dimonitoring dan dievaluasi

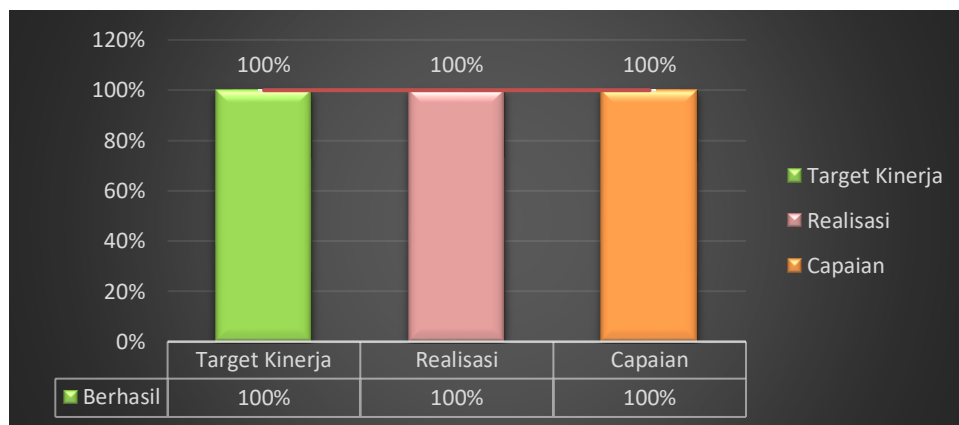


Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 Persentase BUMD Bidang Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang dimonitoring dan dievaluasi dengan capaian 105% dinyatakan berhasil.

**Gambar.16.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD bidang Air Minim, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti

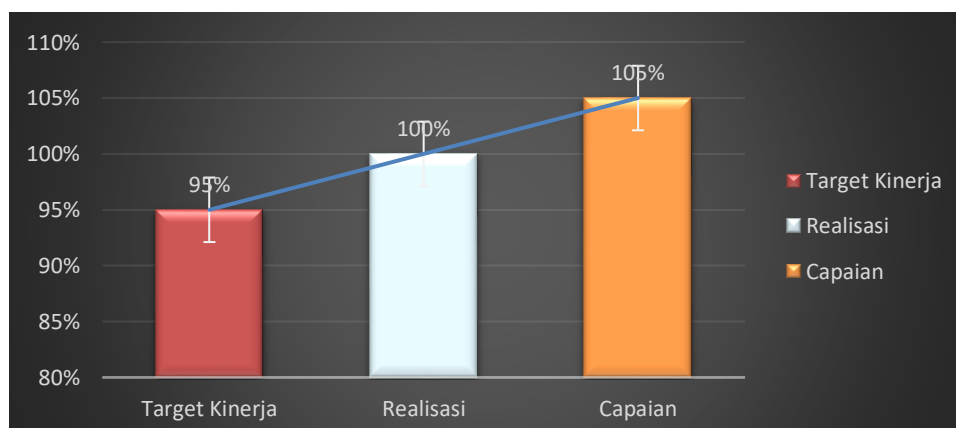


Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD bidang Air Minim, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti dengan capaian 100% dinyatakan berhasil.

**Gambar.17.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di bidang BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti

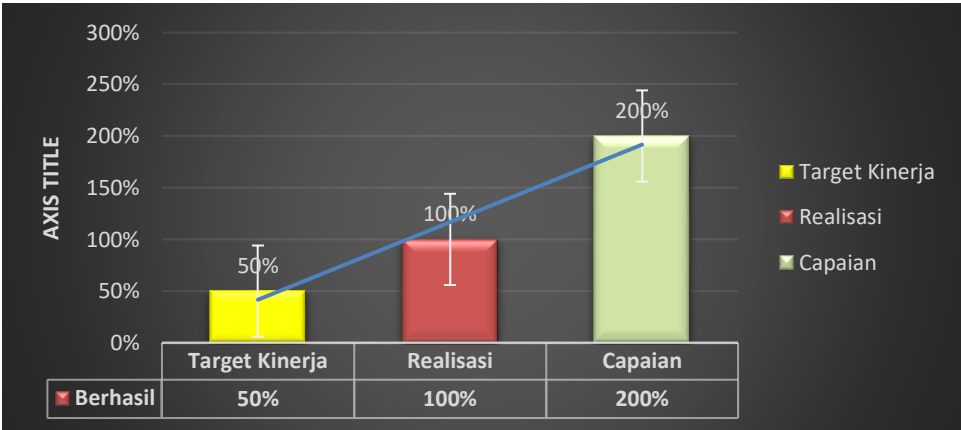


Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di bidang BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti dengan capaian 105% dinyatakan berhasil.

**Gambar.18.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Persentase BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dibina dengan baik

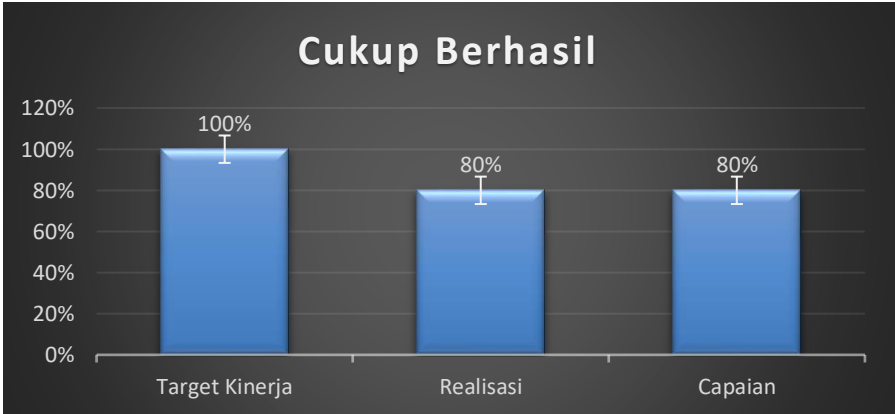


Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 Persentase BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dibina dengan baik capaian 200% dinyatakan berhasil.

**Gambar.18.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Persentase BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dimonitoring dan dievaluasi



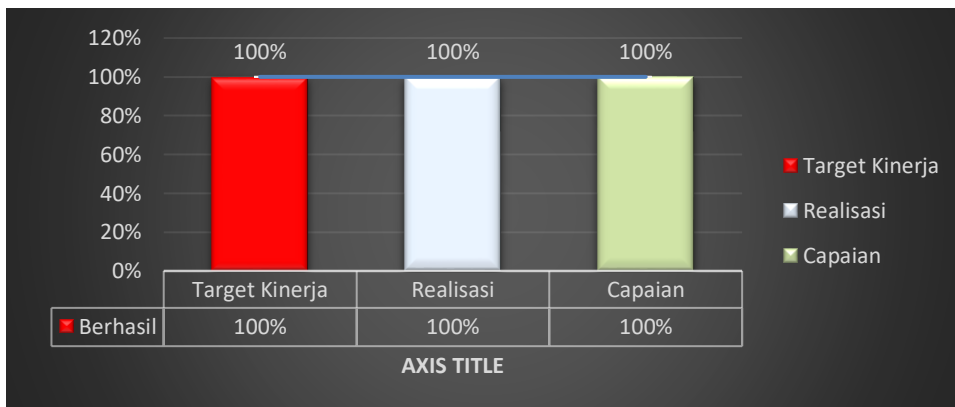
Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 Persentase BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dimonitoring dan dievaluasi dengan capaian 80% dinyatakan cukup berhasil.

**Gambar.19.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

**BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Teknis Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah yang ditindaklanjuti



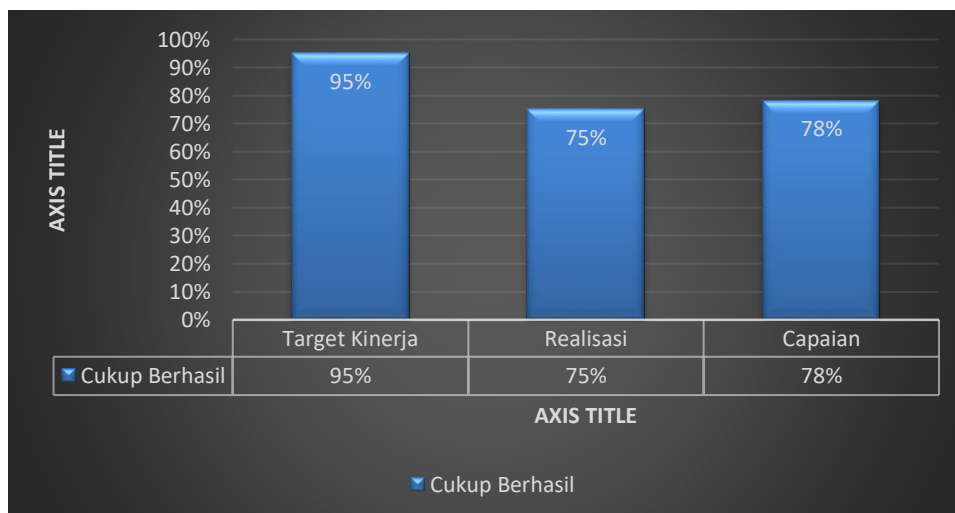
Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 Persentase Rumusan Kebijakan Teknis Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah yang ditindaklanjuti dengan capaian 100% dinyatakan berhasil.

**Gambar.20.**

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

**BERDASARKAN SKALA ORDINAL TAHUN 2024**

Capaian Indikator Persentase Badan Layanan Umum Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi



Berdasarkan grafik diatas, maka pada Tahun 2024 Persentase Badan Layanan Umum Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi dengan capaian 78% dinyatakan cukup berhasil.

Tingkat capaian kinerja Biro Perekonomian Setda Maluku tahun 2024 sebagaimana telah digambarkan pada tabel dan grafik diatas, dapat diukur lebih rinci melalui tabel berikut ini :

**Tabel. 9.**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Biro Perekonomian Setda Maluku Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>Sasaran kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target kinerja</b>	<b>Real</b>	<b>Capaian</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1.	<i>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro Perekonomian</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan administrasi Umum Lingkup Biro Perekonomian yang dilakukan dengan baik</i>	100%	94%	94%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kebijakan Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah dibidang Analisis Ekonomi Makro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Makro yang dimonitoring dan dievaluasi	95%	100%	105%
		Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Mikro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

		Persentase Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Mikro yang dimonitoring dan dievaluasi	95%	80%	85,%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang dimonitoring dan dievaluasi	95%	100%	105%
		Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Kebijakan daerah dibidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dimonitoring dan dievaluasi	95%	100%	105%

		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dihasilkan melalui Penoordinasian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100 %
		Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dimonitoring dan dievaluasi	95%	-	-
		Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Perngoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Usaha Daeah Badan Usaha Milik	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti	95%	100%	105%
		Persentase BUMD bidang Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang dibina dengan baik	100%	100%	100%
		Persentase BUMD Bidang Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang dimonitoring dan dievaluasi	95%	100%	105%
		Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD bidang Air Minim, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di bidang	95%	100%	105%

	BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti			
	Persentase BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dibina dengan baik	50%	100%	200%
	Persentase BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dimonitoring dan dievaluasi	100%	80%	80%
	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase Badan Layanan Umum Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	95%	75%	78%

Dari tabel 9 di atas maka Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Biro Perekonomian Setda Maluku dapat di uraikan secara detail sebagai berikut :

**SASARAN 1**

***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro Perekonomian***

**Capaian Terwujudnya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran**

**Tabel 10**

Sasaran	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro Perekonomian		
		dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut:		
Indokator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase waktu Layanan administrasi kepegawaian dan administrasi umum Lingkup Biro Perekonomian denan baik	100%	94%	94%

Pada sasaran strategis 1 (Satu) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administarasi Untuk menggambarkan ukuran sasaran ini maka perlu dijabarkan melalui tabel perbandingan dengan pendekatan analisis sebagai berikut :

**Tabel 11**

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2023		2024	
	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja (%)
1. Persentase waktu Layanan administrasi kepegawaian dan administrasi umum Lingkup Biro Perekonomian dengan baik	100%	100%	94%	94%

**Tabel 12****Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1  
Tahun 2022 dan 2023 serta Tahun Akhir periode RENSTRA**

Indikator Kinerja		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro Perekonomian	-	-	100%	100%

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan tabel 11 dan 12 maka pada sasaran 1 terkait terwujudnya Pelayanan Administrasi Biro Perekonomian dengan 1 (satu) indikator dimaksud maka dapat dijelaskan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan, efisiensi penggunaan SDM serta program/kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Dalam perspektif Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan untuk tahun 2024 rata-rata capaian pada 1 (Satu) indikator disampaikan berhasil dengan Analisa penyebabnya sebagai berikut:

1. Untuk Indikator Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian, keuangan dan Administrasi Umum Biro Perekonomian Setda Maluku Target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target pelayanan 100%, waktu pelayanan administrasi 12 (dua belas) bulan yaitu menghasilkan Dokumen Kepegawaian berupa Bezathing Kepegawaian, Daftar Urut Kepangkatan, Laporan Keuangan, Laporan Aset Barang Milik Daerah, Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan 1 (satu) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan rata-rata capaian adalah sebesar 94%

Program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut :

**Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi**

Maka kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 40.920.000.00,- dengan realisasi keuangan 47.160.000,- (100%) dan fisik 100% sehingga sisa anggaran sebesar Rp.0,- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah :

**Keluaran :**

Terlaksananya penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan

**Hasil :**

Tertatanya penatausahaan keuangan dengan baik

- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dengan Sub Kegiatan ini sebagai Berikut:

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.676.800,00 dengan realisasi anggaran Sebesar 4.911.500, (100% sehingga sisa anggaran sebesar (0),- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah

**Keluaran :**

Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga

**Hasil :**

Tertatanya Peralatan Rumah Tangga

- c. Penyediaan Bahan logistik Kantor

Dengan Sub Kegiatan ini sebagai Berikut:

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 9.519.700,00,-, dengan realisasi anggaran Sebesar 12.230.600,-, (100% sehingga sisa anggaran sebesar (0),- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah

**Keluaran :**

Terlaksananya Bahan Logistik Kantor

**Hasil :**

Terwujudnya Bahan Logistik Kantor

d. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

Dengan Sub Kegiatan ini sebagai Berikut:

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.857.500,00-, dengan realisasi anggaran Sebesar Rp. 2.857.500,00-, (100% sehingga sisa anggaran sebesar (0),- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah

**Keluaran :**

Terlaksananya Barang Cetak dan Pengandaan

**Hasil :**

Terwujudnya Bahan Cetak dan Pengandaan

e. Fasilitas Kunjungan Tamu

Dengan Sub Kegiatan ini sebagai Berikut:

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 25.800,000-, dengan realisasi anggaran Sebesar Rp. 25.800,000-, (100% sehingga sisa anggaran sebesar (0),-Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah

**Keluaran :**

Terlaksananya Kunjungan Tamu

**Hasil :**

Terwujudnya Kunjungan Tamu

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dengan Sub Kegiatan ini sebagai Berikut:

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 99.430.000,00,- dengan realisasi anggaran Sebesar Rp. 86.368.502,- (0,13% sehingga sisa anggaran sebesar Rp.13.061.498,- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah

**Keluaran :**

Terlaksananya Rapat Koordinasi

**Hasil :**

Terwujunya Rapat Koordinasi

g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dengan Sub Kegiatan ini sebagai Berikut:

Alokasi anggaran sub kegiatan sini sebesar Rp. 46.500.000,- dengan realisasi anggaran Sebesar Rp.46.500.000,- ( 0% ) sehingga sisa anggaran sebesar (-),- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah

**Keluaran :**

Terlaksananya Peralatan Dan Mesin Lainnya

**Hasil :**

Terwujudnya Peralatan Dan Mesin Lainnya

h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dengan Sub Kegiatan ini sebagai Berikut:

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,- dengan realisasi anggaran Sebesar 1.000.000,- ( - ) sehingga sisa anggaran sebesar (0),- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah

**Keluaran :** Terwujudnya Jasa surat menyurat

**Hasil :** Terlaksanan Jasa surat menyurat

i. Penyediaan Jasa Kumunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dengan Sub Kegiatan ini sebagai Berikut:

Alokasi anggaran sub kegiatan sini sebesar Rp. 18.000.000,- dengan realisasi anggaran Sebesar 18.000.000,- (0%) sehingga sisa anggaran sebesar (-),- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah

**Keluaran :**

Terlaksananya Jasa Kumunikasi, sumber daya air dan listrik

**Hasil :**

Terwujundya Jasa Kumunikasi, sumber daya air dan listrik

j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dengan Sub Kegiatan ini sebagai Berikut:

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 70.208.160,- dengan realisasi anggaran Sebesar Rp.64.357.480,- (0,91% ) sehingga sisa anggaran sebesar (5.850.680,-),- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah

**Keluaran :**

Terwujudnya jasa pelayanan umum kantor

**Hasil :**

Terlaksana jasa pelayanan umum kantor

k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dengan Sub Kegiatan ini sebagai Berikut:

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.240.000,- dengan realisasi anggaran Sebesar 35.086.710,- (0,99%) sehingga sisa anggaran sebesar (153.290,00),- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah

**Keluaran :**

Terlaksananya jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas

**Hasil :**

Terwujudnya jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas

i. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dengan Sub Kegiatan ini sebagai Berikut:

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,- dengan realisasi anggaran Sebesar 3.220.000,- (0,80%) sehingga sisa anggaran sebesar (720.000),- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah

**Keluaran :**

Terwujudnya peralatan dan mesin lainnya

**Hasil :**

Terwujudnya peralatan dan mesin lainnya

**SASARAN 2**

**Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Makro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti**

**Tabel.13**

**Capaian Sasaran Peningkatan kesejahteraan melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan**

<b>Sasaran</b>		<b>2</b>	<b>Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Makro yang dihasilkan melalui pengoordinasian yang ditindaklanjuti</b>		
			dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut:		
		<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah dibidang Analisis Ekonomi Makro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.		Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Makro yang dimonitoring dan dievaluasi	95%	100%	105%
3.		Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Mikro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.		Persentase Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Mikro yang dimonitoring dan dievaluasi	95%	85%	85%
5.		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6.		Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan	95%	100%	105%

	dan Perikanan yang dimonitoring dan dievaluasi			
7.	Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
8.	Persentase Kebijakan daerah dibidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dimonitoring dan dievaluasi	95%	100%	105%
9.	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dihasilkan melalui Penoordinasian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100 %
10.	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dimonitoring dan dievaluasi	95%	-	-
11.	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
12.	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti	95%	100%	105%
13.	Persentase BUMD bidang Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang dibina dengan baik	100%	100%	100%
14.	Persentase BUMD Bidang Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang dimonitoring dan dievaluasi	95%	100%	105%
15.	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD bidang Air Minim, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
16.	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di bidang BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti	95%	100%	105%
17.	Persentase BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dibina dengan baik	50%	100%	200%
18.	Persentase BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dimonitoring dan dievaluasi	100%	80%	80%

19	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
20	Persentase Badan Layanan Umum Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	95%	75%	78%

Pada sasaran strategis 2 (dua) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan agar dapat menghidupkan roda perekonomian daerah, maka Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku terus berupaya untuk meningkatkan serta memfasilitasi ketersediaan infrastruktur daerah serta memfasilitasi usaha-usaha daerah. Untuk menggambarkan ukuran sasaran ini maka perlu di jabarkan dengan tabel perbandingan dan pendekatan analisis sebagai berikut :

**Tabel. 14.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2**  
**antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Indikator Kinerja		2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1.	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah dibidang Analisis Ekonomi Makro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%
2.	Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Makro yang dimonitoring dan dievaluasi	-	-	100%	105%
3.	Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Mikro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%

4.	Persentase Kebijakan daerah dibidang analisis ekonomi Mikro yang dimonitoring dan dievaluasi	-	-	80%	85%
5.	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%
6.	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang dimonitoring dan dievaluasi	-	-	100%	105%
7.	Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%
8.	Persentase Kebijakan daerah dibidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dimonitoring dan dievaluasi	-	-	100%	105%
9.	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dihasilkan melalui Penoordinasian yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100 %
10.	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang	-	-	-	-

	dimonitoring dan dievaluasi				
11.	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%
12	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti			100%	105%
13.	Persentase BUMD bidang Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang dibina dengan baik			100%	100%
14.	Persentase BUMD Bidang Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang dimonitoring dan dievaluasi			100%	105%
15.	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%
16.	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di bidang BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti	-	-	100%	105%
17.	Persentase BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dibina dengan baik	-	-	100%	200%
18.	Persentase BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dimonitoring dan dievaluasi	-	-	80%	80%

19.	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%
20	Persentase Badan Layanan Umum Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	-	-	75%	78%

**Tabel.15.**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2**  
**Tahun 2023 dan 2024 serta Tahun Akhir periode RENSTRA**

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024
1.	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Makro yang dihasilkan melalui pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Makro yang dimonitoring dan dievaluasi	100%	100%	95%
3.	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Mikro yang dihasilkan melalui perngoordinasian yang ditindaklanjuti	95%	100%	100%
4.	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Mikro yang dimonitoring dan dievaluasi	95%%	85%	95%
5.	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan melalui pengoordinasian yang ditindalanjuti	100%	100%	100%
6.	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan	100%	100%	95%

	dan Perikanan yang yang dimonitoring dan dievaluasi			
7.	Persentase Rumusan Kebijakan daerah dibidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
8.	Persentase Kebijakan daerah dibidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dimonitoring dan dievaluasi	100%	100%	95%
9.	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah dibidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
10.	Persentase Kebijakan daerah di Bidang Sumber Daya Alam energi dan Air yang dimonitoring dan dievaluasi	100%	-	95%
11.	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti	66,67%	100%	100%
12	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti	66,67%	100%	95%
13.	Persentase BUMD Bidang Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang dibina dengan baik	100%	100%	100%
14.	Persentase BUMD Bidang Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang di Monitoring dan di evaluasi	100%	100%	95%
15.	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD Bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
16.	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang BUMD Bidang	100%	100%	95%

	Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti			
17.	Persentase BUMD Bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dibina dengan baik	100%	100%	50%
18.	Persentase BUMD Bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dimonitoring dan dievaluasi	37,5%	80%	100%
19.	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah yang ditindaklanjuti	50%	100%	100%
20.	Persentase Badan Layanan Umum Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	100%	75%	95%

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan tabel 15 dan 16 maka pada tahun 2024 terdapat beberapa indikator yang terkait dengan sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setda Maluku periode 2019 – 2024

**a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Dalam perspektif analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, maka untuk tahun 2024 rata-rata capaian terhadap kinerja Meningkatnya Kualitas Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kebijakan Perekonomian dinyatakan berhasil sesuai target yang ditetapkan. Analisis keberhasilan untuk setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:

2. Untuk indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Makro yang dihasilkan melalui pengoordinasian yang ditindaklanjuti maka indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Analisa Ekonomi Makro yang berhubungan dengan PDRB dan Inflasi Tahun 2024. Pada tahun 2024 maka target indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Makro (Persentase)

100%, dengan realisasinya adalah 100%, tingkat capaian adalah 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa upaya peningkatan Kebijakan Ekonomi Makro oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengendalikan Inflasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melebihi target yang ditetapkan.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam konteks sebagai berikut :

- **Pertama** : Pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah sinergitas dan komunikasi yang efektif antara berbagai stakeholder dalam mengendalikan inflasi serta meningkatkan perekonomian daerah.
- **Kedua** : Karena arah Sasaran Strategis Indikator ini dikatakan berhasil karena terjadinya peningkatan distribusi rantai produksi yang berjalan baik.

**Tabel. 16.**

**DATA KONDISI CAPAIAN RUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG  
ANALISIS EKONOMI MAKRO PROVINSI MALUKU TAHUN 2024**



# INFLASI

PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN  
DESEMBER 2024 (2022 = 100)

## INFLASI DESEMBER 2024 PROVINSI MALUKU (m-to-m)

**Deflasi Bulan ke Bulan**

(Desember 2024 terhadap November 2024)

**0,41%**

**Inflasi Tahun ke Tahun**

(Desember 2024 terhadap Desember 2023)

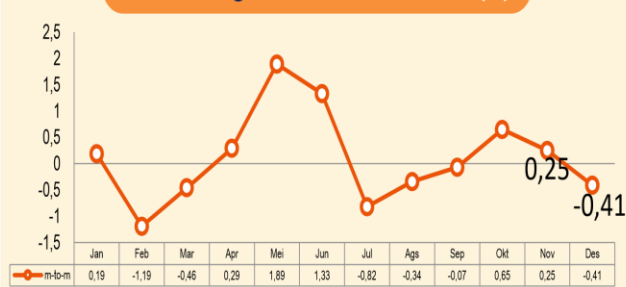
**1,28%**

**Inflasi Tahun Kalender**

(Desember 2024 terhadap Desember 2023)

**1,28%**

Perkembangan inflasi bulan ke bulan (%)



Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (m-to-m, %)

Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
<b>Inflasi Umum</b>	<b>-0.41</b>	<b>-0.41</b>
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0.89	-0.30
2. Pakaian dan Alas Kaki	0.02	~0
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.09	0.01
4. <b>Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga</b>	<b>0.65</b>	<b>0.03</b>
5. Kesehatan	-0.02	~0
6. Transportasi	-0.89	-0.12
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.21	-0.01
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0.32	~0
9. Pendidikan	0.08	~0
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0.02	~0
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0.26	-0.02

~0 : Data sangat kecil/ mendekati 0

## INFLASI DESEMBER 2024 KABUPATEN MALUKU TENGAH (m-to-m)

**Deflasi Bulan ke Bulan**

(Desember 2024 terhadap November 2024)

**0,50%**

**Inflasi Tahun ke Tahun**

(Desember 2024 terhadap Desember 2023)

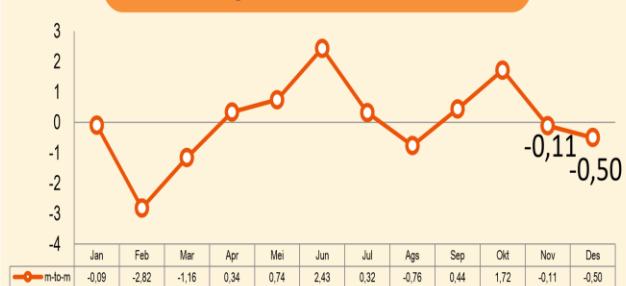
**0,45%**

**Inflasi Tahun Kalender**

(Desember 2024 terhadap Desember 2023)

**0,45%**

Perkembangan inflasi bulan ke bulan (%)



Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (m-to-m, %)

Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
<b>Inflasi Umum</b>	<b>-0.50</b>	<b>-0.50</b>
1. <b>Makanan, Minuman, dan Tembakau</b>	<b>-1.27</b>	<b>-0.57</b>
2. Pakaian dan Alas Kaki	0.04	~0
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.27	0.04
4. <b>Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga</b>	<b>2.03</b>	<b>0.09</b>
5. Kesehatan	-0.46	-0.01
6. Transportasi	0.08	0.01
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.03	~0
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	~0	~0
9. Pendidikan	~0	~0
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	~0	~0
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0.88	-0.06

~0: Data sangat kecil/mendekati nol

## INFLASI DESEMBER 2024 KOTA AMBON (m-to-m)

**Deflasi Bulan ke Bulan**

(Desember 2024 terhadap November 2024)

**0,41%**

**Inflasi Tahun ke Tahun**

(Desember 2024 terhadap Desember 2023)

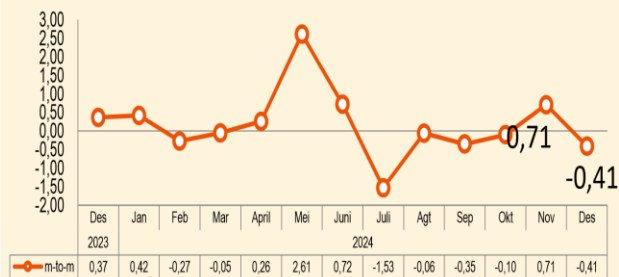
**1,92%**

**Inflasi Tahun Kalender**

(Desember 2024 terhadap Desember 2023)

**1,92%**

**Perkembangan inflasi bulan ke bulan (%)**



**Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (m-to-m, %)**

Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
<b>Inflasi Umum</b>	<b>-0.41</b>	<b>-0.41</b>
<b>1. Makanan, Minuman, dan Tembakau</b>	<b>-0.67</b>	<b>-0.20</b>
2. Pakaian dan Alas Kaki	~0	~0
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0.04	~0
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0.27	-0.01
5. Kesehatan	0.13	~0
<b>6. Transportasi</b>	<b>-1.14</b>	<b>-0.20</b>
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.30	-0.02
<b>8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya</b>	<b>0.48</b>	<b>0.01</b>
<b>9. Pendidikan</b>	<b>0.12</b>	<b>0.01</b>
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0.02	~0
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0.01	~0

~0: Data sangat kecil/mendekati nol

## INFLASI DESEMBER 2024 KOTA TUAL (m-to-m)

**Inflasi Bulan ke Bulan**

(Desember 2024 terhadap November 2024)

**0,12%**

**Inflasi Tahun ke Tahun**

(Desember 2024 terhadap Desember 2023)

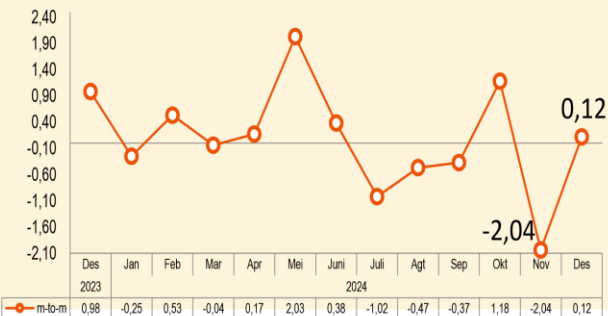
**0,16%**

**Inflasi Tahun Kalender**

(Desember 2024 terhadap Desember 2023)

**0,16%**

**Perkembangan inflasi bulan ke bulan (%)**



Tingkat inflasi bulanan Desember 2024 **lebih tinggi** dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

**Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (m-to-m, %)**

Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
<b>Inflasi Umum</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>
<b>1. Makanan, Minuman, dan Tembakau</b>	<b>0.69</b>	<b>0.27</b>
2. Pakaian dan Alas Kaki	0.14	0.01
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.12	0.02
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.11	~0
5. Kesehatan	0.89	0.01
<b>6. Transportasi</b>	<b>-1.42</b>	<b>-0.18</b>
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.09	-0.01
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0.15	~0
9. Pendidikan	~0	~0
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	~0	~0
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	~0	~0






~0: Data sangat kecil/mendekati nol

# ANDIL 5 KOMODITAS (MtM)






Pemicu/Penghambat Inflasi








## Maluku Tengah

	Ikan Selar/Kawalinya (-0,71)
	Lemon (-0,34)
	Ikan Layang/Mumar (-0,27)
	Ikan Tongkol/Komu (-0,25)
	Ikan Tuna (-0,11)

## KOTA AMBON

	Angkutan Udara (-0,27)
	Lemon (-0,09)
	Ikan Kawalinya (-0,08)
	Ikan Tongkol (-,006)
	Ikan Cakalang 0,04)

## Kota Tual

	Cabai (0,07)
	Bawang (0,07)
	Ika Tongkol/Komu (0,06)
	Pepay (0,05)
	Baya (0,04)



## INFLASI DESEMBER 2024 PROVINSI MALUKU (y-on-y)

### Inflasi Tahun ke Tahun

(Desember 2024 terhadap Desember 2023)

# 1,28%

#### Perkembangan inflasi tahun ke tahun (%)



“ Tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2024 **lebih rendah** dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

#### Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (y-on-y, %)

Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
<b>Inflasi Umum</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	0.78	0.27
2. Pakaian dan Alas Kaki	0.95	0.05
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.14	0.02
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1.52	0.07
5. Kesehatan	4.70	0.09
<b>6. Transportasi</b>	<b>-1.61</b>	<b>-0.22</b>
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.38	-0.02
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-2.62	-0.03
9. Pendidikan	0.85	0.03
<b>10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran</b>	<b>8.11</b>	<b>0.58</b>
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5.43	0.44

## INFLASI DESEMBER 2024 KABUPATEN MALUKU TENGAH (y-on-y)

### Inflasi Tahun ke Tahun

(Desember 2024 terhadap Desember 2023)

# 0,45%

#### Perkembangan inflasi tahun ke tahun (%)



“ Tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2024 **lebih rendah** dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

#### Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (y-on-y, %)

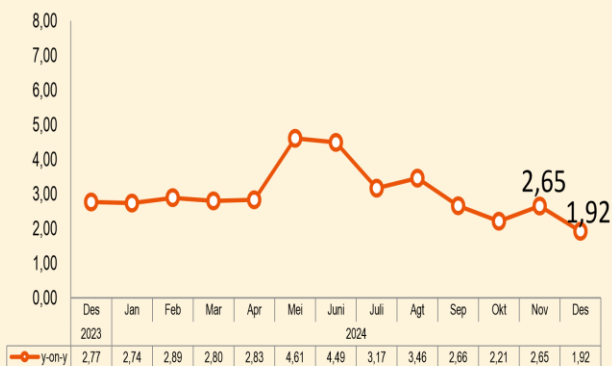
Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
<b>Inflasi Umum</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>
<b>1. Makanan, Minuman, dan Tembakau</b>	<b>-0.95</b>	<b>-0.43</b>
2. Pakaian dan Alas Kaki	1.21	0.07
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0.09	-0.01
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.71	0.03
5. Kesehatan	-0.05	~0
6. Transportasi	-2.42	-0.19
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.73	-0.04
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-9.99	-0.12
9. Pendidikan	~0	~0
<b>10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran</b>	<b>14.22</b>	<b>0.79</b>
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5.77	0.35

~0: Data sangat kecil/mendekati nol

## INFLASI DESEMBER 2024 KOTA AMBON (y-on-y)

**Inflasi Tahun ke Tahun**  
(Desember 2024 terhadap Desember 2023) **1,92%**

Perkembangan inflasi tahun ke tahun (%)



Tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2024 **lebih rendah** dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

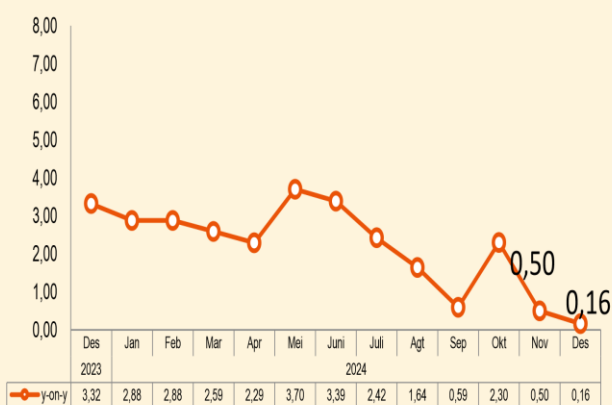
Inflasi Berdasarkan Kelompok (y-on-y,%)

Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
<b>Inflasi Umum</b>	<b>1.92</b>	<b>1.92</b>
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	2.73	0.75
2. Pakaian dan Alas Kaki	0.95	0.05
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.35	0.04
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2.36	0.10
5. Kesehatan	6.78	0.15
6. Transportasi	-1.34	-0.24
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.17	-0.01
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	2.02	0.03
9. Pendidikan	1.27	0.06
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	5.81	0.48
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5.49	0.51

## INFLASI DESEMBER 2024 KOTA TUAL (y-on-y)

**Inflasi Tahun ke Tahun**  
(Desember 2024 terhadap Desember 2023) **0,16%**

Perkembangan inflasi tahun ke tahun (%)



Tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2024 **lebih rendah** dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Inflasi Berdasarkan Kelompok (y-on-y,%)

Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
<b>Inflasi Umum</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	0.80	0.31
2. Pakaian dan Alas Kaki	-1.03	-0.06
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0.25	-0.04
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-1.58	-0.06
5. Kesehatan	2.66	0.02
6. Transportasi	-2.13	-0.27
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.83	-0.05
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-4.68	-0.04
9. Pendidikan	~0	~0
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2.45	0.17
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2.51	0.18

-0: Data sangat kecil/mendekati nol

## ANDIL 5 KOMODITAS (YoY)



### Pemicu Inflasi

Maluku Tengah	Kota Ambon	Kota Tual
 Nasi Dengan Lauk (0,60)	 Beras (0,44)	 Beras (0,61)
 Tomat (0,40)	 Emas Perhiasan (0,37)	 Bawang Merah (0,27)
 Beras (0,39)	 Nasi dengan Lauk (0,17)	 Sigaret Kretek Mesin (SKM) (0,18)
 Kopi Bubuk (0,39)	 Bawang Merah (0,16)	 Ikan Sikuda/Lencam (0,17)
 Bawang Merah (0,38)	 Sigaret Kretek Mesin (SKM) (0,13)	 Emas Perhiasan (0,10)

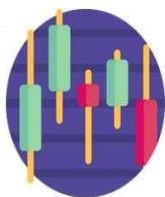
## INFLASI ANTARKOTA DESEMBER 2024



Kabupaten/Kota	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
Kabupaten Maluku Tengah	106.73	0.45	-0.50
Kota Ambon	107.20	1.92	-0.41
Kota Tual	106.50	0.16	0.12
Provinsi Maluku	106.99	1.28	-0.41

Tingkat inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 1,92 persen dan terendah terjadi di Kota Tual sebesar 0,16 persen.

## RINGKASAN INFLASI DESEMBER 2024



Pada bulan Desember 2024, terjadi deflasi m-to-m sebesar **0,41 %**, inflasi y-on-y dan inflasi y-to-d sebesar **1,28%**



Penyumbang utama deflasi bulan Desember 2024 secara m-to-m adalah kelompok **Makanan, Minuman dan Tembakau** dengan andil **0,30%**. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain : ikan selar/kawalinya, lemon, ikan tongkol/komu, ikan layang/mumar, ikan cakalang, ikan tuna, cabai rawit, cabai merah, daun melinjo, talas/keladi, kangkung, semangka, daging ayam ras, jahe. Penyumbang utama inflasi bulan Desember 2024 secara y-on-y adalah



Kelompok **Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran** dengan andil **0,58%**. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk, ayam goreng, bakso siap santap, kue kering berminyak, ikan goreng, sate, sayur olahan, gado-gado.

Kelompok **Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya** dengan andil **0,44%**. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, shampo, popok bayi sekali pakai/diapers, parfum, krim wajah, tarif gunting rambut pria, sabun wajah.

Kelompok **Makanan, Minuman dan Tembakau** dengan andil **0,27%**. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, bawang merah, sigaret kretek mesin (SKM), tomat, kopi bubuk, sawi hijau, sigaret putih mesin (SPM), bawang putih, ikan asap, daun singkong.

Program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Perekonomian Ekonomi Makro, Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 899.611.080,00,- dengan realisasi keuangan 771.927.464, - (85,80%) dan fisik 100% sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 127.683.616,- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah :

**Keluaran :**

Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan ekonomi Makro

**Hasil :**

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Makro di daerah

3. Untuk indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Mikro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti maka dalam rangka menindaklanjuti Rumusan Kebijakan Ekonomi Mikro menghasilkan 2 (Dua) Rumusan Kebijakan yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku tentang Petugas Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) tahun 2024 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah tahun 2024. Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Mikro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti (Persentase) 100%, dengan realisasi adalah 100%, tingkat capaian adalah 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa upaya peningkatan Kebijakan Ekonomi Mikro oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam konteks sebagai berikut :

- **Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah sinergitas dan komunikasi yang efektif antara berbagai stakeholder dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

4. Untuk indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Mikro yang dimonitoring dan dievaluasi maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap petugas Konsultan Keuangan Mitra Bank di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Tahun 2024 dimana tugas dan fungsi adalah melakukan pendampingan terhadap pelaku-pelaku usaha (UMKM) guna mendapatkan akses Perbankan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maka target Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Mikro (Persentase) 95%, dengan realisasinya adalah 85%, tingkat capaian adalah 85%. Hal ini dapat diartikan bahwa upaya peningkatan Kebijakan Ekonomi Mikro oleh Pemerintah Provinsi Maluku guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha (UMKM).

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam konteks sebagai berikut :

- **Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan cukup berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah sinergitas dan komunikasi yang efektif antara berbagai stoakholder dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

**Tabel. 17.**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Mikro yang dimonitoring dan dievaluasi	7 (Tujuh) Laporan Hasil Monitoring/Evaluasi	7 (Tujuh) Kabupaten/Kota	85%
indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Mikro yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	2 (Dua) Rumusan Kebijakan Daerah. 1. Surat Keputusan Gubernur Maluku tentang Petugas Konsultan Keuangan Mitra	Provinsi Maluku	100%

	Bank Tahun 2024. 2. 2. Surat Keputusan Gubernur Maluku tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2024		
--	---	--	--

**DATA KONDISI CAPAIAN RUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG ANALISIS EKONOMI MIKRO PROVINSI MALUKU TAHUN 2024**

Program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut :

b. Falisilitasi Kebijakan Ekonomi Mikro

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.357.048.780,- dengan realisasi keuangan Rp.335.119.360,- (93,85%) dan fisik 100% sehingga sisa anggaran sebesar 21.929.420,- Capaian kinerja Sub Kegiatan ini adalah :

**Keluaran :**

Terwujudnya Laporan Evaluasi dan Monitoring di 5 (Lima) Kabupaten/Kota

**Hasil :**

Sebagai Bahan Rumusan dalam rangka kebijakan ekonomi Mikro

- Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti maka upaya yang dilaksanakan guna menindaklanjuti Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan maka dilaksanakan Pengoordinasian Kebijakan dengan pihak-pihak terkait yaitu Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Kehutanan guna Pengelolaan Sumber Daya Alam Provinsi Maluku yang lebih optimal. Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Dalam Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

(Persentase) 100%, dengan realisasi adalah 100%, tingkat capaian adalah 100%. Upaya peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Pengoordinasian yang intens demi meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam konteks sebagai berikut :

➤ **Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah koordinasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai stakeholder dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomian daerah.

6. Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang dimonitoring dan dievaluasi maka berdasarkan hasil pengoordinasian dengan Instansi terkait dan ditindaklanjuti dengan memonitoring dan evaluasi yang menghasilkan 4 (Empat) Dokumen laporan Monitoring dan evaluasi dengan (Persentase) 95%, dengan realisasinya adalah 100%, tingkat capaian adalah 105%. Upaya peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui monitoring dan Evaluasi terus dilaksanakan demi meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam tiga konteks sebagai berikut :

➤ **Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah koordinasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai stakeholder dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomian daerah

**Tabel.18.**

**DATA KONDISI CAPAIAN RUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2024**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan yang dihasilkan melalui Pengordinasian yang ditindaklanjuti	3 (Rumusan) Materi Kebijakan di Sub Kegiatan SDA Oertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan T.A. 2024	5 (Lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	100%
Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan yang dimonitoring dan dievaluasi	4 (empat) Dokumen Monitoring dan dievaluasi Sumber Daya Alam yang dimonitoring dan dievaluasi	4 (Empat) Dokumen Laporan Monitoring (Kota Ambon, Kab.Buru, Kab.Maluku Tengah dan Kab. Kepulauan Tanimbar	105%

Program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam dengan sub kegiatan adalah :

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 150.009.400,- dengan realisasi keuangan Rp. 132.395.460,00,-. dan fisik 88,25% sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 17.613.940,- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah:

**Keluaran :**

Jumlah dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam

**Hasil :**

Rapat Koordinasi Daerah dalam rangka meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam Provinsi Maluku

7. Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan lingkungan Hidup yang dihasilkan melalui pengoordinasian yang ditindaklanjuti maka untuk merumuskan Kebijakan tersebut dilaksanakan Pengoordinasian Kebijakan dengan Instansi terkait yaitu Badan Pertambangan Air dan Mineral, Dinas Lingkungan Hidup Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku sehingga menghasilkan 3 (Tiga) Dokumen Materi Kebijakan Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dengan Persentase sebesar 100%, dengan realisasinya adalah 100%, tingkat capaian adalah 100%.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam tiga konteks sebagai berikut :

- **Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah koordinasi dan komunikasi yang efektif antar berbagai stakeholder dalam meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

8. Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dimonitoring dan dievaluasi maka untuk merumuskan Kebijakan tersebut dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup bersama satuan perangkat daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang menghasilkan 2 (dua) Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi. Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Dalam Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dimonitoring dan dievaluasi (Persentase) sebesar 100%, dengan realisasinya adalah 100%, tingkat capaian adalah 100%.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam tiga konteks sebagai berikut :

- **Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan

adalah koordinasi dan komunikasi yang efektif antar berbagai stokholder dalam meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang mendorong pertumbuhan ekonomian daerah.

**Tabel.19.**

**DATA KONDISI CAPAIAN RUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DI HASILKAN MELALUI PENGOORDINASIAN YANG DITINDAKLANJUTI SERTA HASIL MONITORING DAN DIEVALUASI PROVINSI MALUKU TAHUN 2024**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dimonitoring dan dievaluasi	2 (Dua) Rumusan Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi di OPD terkait (Bagian Ekonomi Kab. Maluku Tengah dan Pertanian Maluku)	Kab. Maluku Tengah dan Kota Ambon	100%
Persentase Rumusan Daerah dibidang SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	3 (Tiga) Dokumen Materi Kebijakan Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Maluku Tengah dan Kota Ambon	100%

Program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut :

d. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam dengan sub kegiatan adalah :

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 84.157.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 81.717.238,- (97,10%) dan fisik 100% sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.440.262,- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah:

**Keluaran :**

Jumlah dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam

## Hasil :

Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam

9. Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dimonitoring dan dievaluasi tidak dilaksanakan. (Persentase) 95%, dengan realisasi adalah 0%, tingkat capaian adalah 0%.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam tiga konteks sebagai berikut :

- **Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan tidak berhasil. Faktor yang menyebabkan ketidak berhasilan adalah tidak dialokasikan anggaran pada tahun 2024.

10. Indikator Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti maka untuk merumuskan Kebijakan tersebut dilaksanakan Pengoordinasian Kebijakan dengan Instansi terkait yaitu Badan Pertambangan Air dan Mineral, Dinas Lingkungan Hidup Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku sehingga menghasilkan 1 (Satu) Dokumen Rumusan Materi Kebijakan dibidang Sumber Daya Alam Energi dan Air (Persentase) 100%, dengan realisasin adalah 100%, tingkat capaian adalah 100%.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam tiga konteks sebagai berikut :

- **Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah koordinasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai stekholder dalam meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam Energi dan Air demi meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomian daerah.

Program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- e. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam dengan sub kegiatan adalah :

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.954.000,-dengan realisasi keuangan Rp. 29.608.620,- (82,35%) dan fisik 100% sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 6.060.00,- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah:

**Keluaran :**

Jumlah dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam

**Hasil :**

Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam

**Tabel.20.**

**DATA KONDISI CAPAIAN RUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM ENERGI DAN AIR YANG DIHASILKAN MELALUI PENGOORDINASIAN YANG DITINDAKLANJUTI DAN PERSENTSE KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM ENERGI DAN AIR YANG DIMONITORING DAN DIEVALUASI PROVINSI MALUKU TAHUN 2024**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	1 (Satu) Rumusan KebijakanS DA Air dan Energi	2 (Dua) SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	100%
Persentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air yang dimonitoring dan dievaluasi	-	-	-

11. Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD Jasa Keuangan dan aneka Usaha yang ditindaklanjuti maka untuk merumuskan Kebijakan tersebut menghasilkan 3 (Tiga) Rumusan Fasilitas Ranpeda Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Maluku dan Maluku Utara. Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD Jasa Keuangan dan aneka Usaha yang ditindaklanjuti (Persentase) 100%, dengan realisasi adalah 100%, tingkat capaian adalah 100%.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam konteks sebagai berikut :

**Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah Koordinasi yang efektif dengan BUMD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

12. Indikator Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang BUMD Jasa Keuangan dan aneka Usaha yang ditindaklanjuti maka untuk merumuskan Kebijakan

tersebut menghasilkan 1 (Satu) Rumusan Kebijakan Daerah yaitu Rekomendasi RAKP Perumda Panca Karya. Dengan (Persentase) 95%, dengan realisasi adalah 100%, tingkat capaian adalah 105%.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam tiga konteks sebagai berikut :

**Pertama** : Pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah koordinasi yang efektif dan evaluasi dengan BUMD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

13. Indikator Persentase BUMD Jasa Keuangan dan aneka Usaha yang dibina dengan baik maka untuk menindaklanjuti dilakukan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD serta Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang dibina dengan baik. Kegiatan pembinaan ini menghasilkan 4 (Empat) Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan BUMD. Persentase BUMD Jasa Keuangan dan aneka Usaha yang dibina dengan baik (Persentase) 100%, dengan realisasi adalah 100%, tingkat capaian adalah 100%.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam tiga konteks sebagai berikut :

**Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah koordinasi dan pembinaan yang efektif antara berbagai stekholder dalam Meningkatnya pengelolaan Badan Usaha Umum Daerah di Provinsi Maluku.

14. Indikator Persentase BUMD Jasa Keuangan dan aneka Usaha yang dimonitoring dan dievaluasi maka dilaksanakan Monitoring dan evaluasi pada 5 (Lima) Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perum Panca Karya, PT Maluku Energi Abadi, PT. Bank Maluku, Kabupaten Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat. kegiatan monitoring dan evaluasi menghasilkan 5 (Lima) Dokumen. Persentase BUMD Jasa Keuangan dan aneka Usaha yang dimonitoring dan evaluasi (Persentase) 95%, dengan realisasi adalah 100%, tingkat capaian adalah 105%%.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam konteks sebagai berikut :

**Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap Badan Usaha Milik Daerah serta koordinasi dalam Meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Umum Daerah di Provinsi Maluku.

15. Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD bidang Air Minum, Limbah dan sanitasi yang ditindaklanjuti yaitu 3 (Tiga) Rumusan. 1 (Satu) Rumusan Fasilitas Ranperbub Kabupaten Maluku Barat Daya Tentang ketentuan pokok Kepegawaian Perimda Air Minum Tirta Kalwedo. 2 (Dua) Rumusan Fasilitas Rancangan Peraturan Wali kota Tual Tentang Penetapan Tarif Air Minum Perumda Air Minum Maren. 3 (Tiga) Rumusan Fasilitas Ranperwali Kota Tual Tentang Penghapusan denda dan piutang tungakan air minum Maren. Dengan (Persentase) (100%) dengan realisasi adalah 100%, tingkat capaian adalah 100%%.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam konteks sebagai berikut :

**Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah koordinasi yang efektif terhadap Badan Usaha Milik Daerah serta koordinasi dalam Meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Maluku.

16. Indikator kinerja Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti yang menghasilkan 1 (Satu) Rumusan Kebijakan Daerah Surat Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Provinsi Maluku Tahun 2025 Dengan (Persentase) (95%) dengan realisasi adalah 100%, tingkat capaian adalah 105%.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam konteks sebagai berikut :

**Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah koordinasi yang efektif terhadap Badan Usaha Milik Daerah serta koordinasi dalam Meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Maluku.

17. Indikator Persentase BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dibina dengan baik. Dalam konteks ini dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dengan menghasilkan 8 (Delapan) Dokumen Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Dengan (Persentase) (50%) dengan realisasi adalah 100%, tingkat capaian adalah 200%.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam konteks sebagai berikut :

**Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah pembinaan koordinasi yang efektif terhadap Badan Usaha Milik Daerah serta koordinasi dalam Meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Maluku.

18. Persentase BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dimonitoring dan dievaluasi maka dilakukan Monitoring dan evaluasi pada 2 (Dua) Badan Usaha Milik Daerah dengan menghasilkan 2 (Dua) Dokumen Laporan monitoring dan Evaluasi dengan (Persentase) (100%) dengan realisasi adalah 80%, tingkat capaian adalah 80%.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam tiga konteks sebagai berikut :

**Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan cukup berhasil. Faktor yang menyebabkan yaitu pelaksanaan evaluasi dan Monitoring BUMD yang cukup baik pada Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.

19. Persentase Rumusan Kebijakan Teknis Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah yang ditindaklanjuti yaitu 1 (Satu) Rumusan Materi Kebijakan Teknis

Badan Layanan Umum Daerah dengan (Persentase) (100%) dengan realisasi adalah 100%. Dengan tingkat capaian adalah 100%.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam konteks sebagai berikut :

**Pertama** : Pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Faktor yang menyebabkan adalah Evaluasi dan Monitoring yang intensif terhadap Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.

20. Persentase Rumusan Kebijakan Teknis Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi yaitu 1 (Satu) Dokumen Laporan Monitoring dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haulussy Ambon Provinsi Maluku dengan (Persentase) (95%) dengan realisasi adalah 75%, tingkat capaian adalah 78%.

Untuk melihat capaian pada indikator dimaksud maka dapat dianalisis dalam tiga konteks sebagai berikut :

**Pertama** : pada konteks perbandingan antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan cukup berhasil. Faktor yang menyebabkan adalah pelaksanaan koordinasi yang cukup efektif terhadap Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Maluku.

Kegiatan **Pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BULD**, dengan sub kegiatan adalah :

f. Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa keuangan dan Aneka Usaha.

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 125.067.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 119.137.940,00,- (95%) dan fisik 100% sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 5.929.560,00,- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah :

**Keluaran :**

Jumlah dokumen hasil sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik, Daerah jasa keuangan dan Aneka Usaha

**Hasil :**

Meningkatnya pengelolaan milik daerah

g. Kegiatan **Pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BULD**, dengan sub kegiatan adalah :

Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi.

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,00,- dengan realisasi keuangan Rp. 74.580.920,00,- (93,03%) dan fisik 100% sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 419.080,00,- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah :

**Keluaran :**

Jumlah dokumen hasil sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik, Daerah jasa keuangan dan Aneka Usaha

**Hasil :**

Meningkatnya pengelolaan milik daerah

h. Kegiatan pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BULD, dengan sub kegiatan adalah :

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan BLUD Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 39.979.840,00,- (93%) dan fisik 100% sehingga sisa

anggaran sebesar Rp. 20.160,00,- Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah :

**Keluaran :**

Jumlah dokumen hasil sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

**Hasil :**

Meningkatnya pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

**Tabel.21.**

**DATA KONDISI CAPAIAN RUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI  
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH (BLUD)  
PROVINSI MALUKU TAHUN 2024**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usah yang ditindaklanjuti	2 (Dua) Rumusan Faslitasi Ramperda	Kab. Seram Bagian Barat dan Kab. Kepulauan Aru	100%
Rumusan Kebijakan Daerah Bidang BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang ditindaklanjuti	2 (Dua) Surat Keputusan Gubernur Maluku tentang Pembagian Labah Perumda Panca Karya, Perda Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Maluku-Maluku Utara	Provinsi Maluku	105%
Persentase BUMD Bidang Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang dibina dengan Baik	Dokumen Laporan Kinerja, Laporan Keuangan dan Laporan RKAP	Provinsi Maluku	100%
Persentase BUMD Bidang Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang dimonitoring dan dievaluasi	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi BUMD-Perumda Panca Karya, PT.Maluku Energi Abadi, PT. Bank Maluku-MALUT, Kab. Maluku Tengah dan Kab. Seram Bagaian Barat	Provinsi Maluku dan Kab. Seram Bagian Barat	105%
Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dibidang BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti	1. Rumusan Fasilitasi Ranperbub Kabupaten Maluku Barat Daya Tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perumda Air Minum 2. Rumusan Fasilitasi Ranperwali Kota Tual	Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kota Tual	100%

	Tentang Penetapan Tarif Air Minum 3. Rumusan Fasilitasi Ranperwali Kota Tual Tentang Penghapusan denda dan piutang tunggakan air minum		
Persentase Rumusan Kebijakan Daerah dibidang BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang ditindaklanjuti	1. Rumusan Kebijakan Daerah Surat Keputusan Gubernur Maluku Tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Provinsi Maluku	Provinsi Maluku	105%
Persentase BUMD Bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang di Bina dengan baik	Dokumen Laporan Kinerja 8 (Delapan) BUMD	Provinsi Maluku	200%
Persentase BUMD bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang dimonitoring dan dievaluasi	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi 2 Badan Usaha Milik Daerah	Kota Ambon dan Buruh Selatan	80%
Persentase Rumusan Kebijakan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah yang ditindaklanjuti	1 (Rumusan Kebijakan Teknis Badan Layanan Umum Daerah	Kota Ambon	100%
Persentase Badan Layanan Umum Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	Dokumen Laporan Monev BLUD RSUD dr. Haulusi	Kota Ambon	78%

## 21. Analisis atas efisiensi penggunaan SDM

Dalam konteks analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) maka sasaran strategis meningkatnya pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Badan Usaha Daerah dan Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Badan Umum Layanan Daerah dikelola oleh bagian Teknis pada Biro Perekonomian Setda Maluku yaitu dengan jumlah aparatur adalah 22 orang. Aparatur yang ada tetap fokus pada pengelolaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang efektif dan tepat sasaran guna memenuhi capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Efisiensi sumber daya manusia dengan jumlah personil yang tersedia dengan distribusi fungsi yang jelas terhadap aparatur yang menangani program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat berdampak terhadap capaian sasaran strategis ini dimana rata-rata capaian di atas 100%

## 22. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan dari sasaran strategis ini maka terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian setiap indikator yang ditetapkan dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Analisa realisasi anggaran kami sajikan untuk memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap data keuangan yang meliputi program/kegiatan sub/kegiatan, alokasi pagu anggaran dan realisasi keuangan.

Pada tahun anggaran 2024 Biro Perekonomian Setda Maluku mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar **Rp.2.125.000.420,00 (Dua Milyard Seratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** Dengan realisasi anggaran yaitu **Rp. 1.929.613.534,00 (Satu Milyard Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)**. Dengan persentase realisasi anggaran sebesar 90,80%.

# Penutup

# Bab IV

## 4.1. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Perekonomian Setda Maluku untuk Periode Januari s/d Desember 2024 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Biro Perekonomian Setda Maluku. Dengan demikian, pelaporan LKIP ini merupakan sarana bagi Biro Perekonomian Setda Maluku untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan seperti telah dijelaskan sebelumnya memang banyak menghadapi kendala dan tantangan, baik disebabkan oleh karena perencanaan yang kurang efektif dan efisien, maupun keterbatasan anggaran di tahun 2024. Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi termasuk faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya target capaian kinerja pada setiap sasaran, dan apabila dihubungkan dengan target capaian kinerja berdasarkan rencana strategis 2019-2024, sangat disadari masih banyak target-target sasaran yang belum tercapai secara maksimal yang tentu pada periode Rencana Strategis 2019-2024 harus menjadi perhatian serius.

## 4.2. Tinjauan Khusus

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada pencapaian sasaran seperti diuraikan dalam BAB sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran Biro Perekonomian Setda Maluku pada periode anggaran 2024 dikategorikan berhasil. Capaian kinerja dianalisis terhadap tingkat capaian dan dapat dilihat bahwa 2 sasaran telah mencapai kategori berhasil dengan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 100%. Tingkat capaian kinerja ini adalah hasil perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan yang didasarkan pada program kegiatan yang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian serius untuk tahun anggaran

berikutnya. Perhatian serius pula harus dilakukan pada sasaran-sasaran yang belum dilaksanakan dari rencana strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Perekonomian Setda Maluku 2019-2024.

#### **4.3. Saran dan Tindak Lanjut**

Agar semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dapat dicapai secara maksimal maka tentu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh setiap sasaran yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan atau pun yang belum tercapai secara maksimal. Seperti telah diuraikan sebelumnya yang merupakan faktor yang turut mempengaruhi pencapaian target adalah ketersediaan anggaran, maka yang menjadi saran kami kiranya pengembangan ekonomi kerakyatan benar-benar menjadi skala prioritas mulai dari perencanaan bahkan sampai pelaksanaan dan realisasi anggaran.

Disamping itu Biro Perekonomian Setda Maluku akan berupaya senantiasa mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku dapat terealisasi dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian Setda Maluku Tahun 2024, yang merupakan bahan evaluasi sekaligus sebagai pertanggungjawaban mandat yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sesuai tugas dan fungsinya.

Ambon, 17 Januari 2025

Kepala Biro Perekonomian  
Setda Maluku



Onesimus Soumeru, S.Sos, S.Pd. M. Si  
NIP. 19660919 198601 1001

# LAMPIRAN

# **LAMPIRAN**

## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

### **BIRO PEREKONOMIAN SETDA MALUKU**

#### **TAHUN ANGGARAN 2024**



